Lampiran
Surat Kepala Dinas Kominfo Kab. Lumajang
Nomor : 482/3296/427.53/2018
Tanggal : 05 Oktober 2018

IDENTIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID OPD DINAS PENDIDIKAN

No	**Informasi *(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)***	**Dasar Hukum Pengecualian Informasi**	**Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (*berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya*)**		**Jangka Waktu *(disebutkan jangka waktunya)***
			Dibuka	**Ditutup**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Biodata elektronok PNS (database)	- UUD RI tahun 1945 pasal 28 A s.d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
2.	Dokumen/berkas /Arsip PNS	- UUD RI tahun 1945 pasal 28 A s.d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
3.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	- UUD RI tahun 1945 pasal 28 A s.d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

4.	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan	- UUD RI tahun 1945 pasal 28 A s.d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
5.	Daftar nilai DP-3 PNS	- UUD RI tahun 1945 pasal 28 A s.d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i - PP No. 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
6.	Arsip dinamis yang sifatnya rahasia	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
7.	Dokumen Penawaran Kontrak	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/jasa selesai

8.	Kode Akses Elektronik	- UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 angka 16	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringanKomputer	Tidak Terbatas
9.	Naskah soal UN/UNBK/UAS dll.	- Permendiknas, Petunjuk Opersional Sistem (POS)	Membocorkan Rahasia Negara	Melindungi Rahasia Negara	Terbatas sesuai tahun berjalan

Lumajang, 23 Oktober 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lumajang

Drs. SISWINARKO, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19620207 198303 1 011